

Analisis Disparitas Garis Kemiskinan Di Kabupaten Bone Bolango (Studi Kasus Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bone Pantai)

Ilham Hamzah¹, Syarwani Canon², Ivan Rahmat Santoso^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
Jl. Jendral Sudirman No. 56 Kota Gorontalo - 96543

*e-mail : ivan_santoso@ung.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

12 January 2023

Revised :

26 September 2024

Accepted :

19 November 2024

Kata Kunci :
Garis Kemiskinan,
Disparitas, Harga

Keywords :
*Poverty Line, Disparity,
Price*

Perbedaan kondisi ekonomi menjadi salah-satu penyebab disparitas pendapatan di masyarakat yang memicu kemiskinan di beberapa wilayah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan harga komoditas makanan dan non makanan antara Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bone pantai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa disparitas garis kemiskinan di kecamatan Kabila dan Kecamatan Bone Pantai diakibatkan oleh adanya perbedaan harga antara komoditas makanan dan non makanan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 1) Infrastruktur, Infrastruktur pada kecamatan kabila terbilang memadai dengan biaya operasional yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan Bone pantai dengan kondisi pasar yang tidak memadai yang lebih memanfaatkan ruas jalan di sekitar pasar tersebut; 2) jarak, jarak pedagang yang terjadi antar wilayah melalui tempat produksi barang jadi yang ada di kecamatan kabila lebih strategis dibandingkan dengan Kecamatan Bone Pantai, tetapi beda halnya dari segi pasokan sumber daya alam dimana Kecamatan Bone Pantai yang lebih strategis dalam penghasil pasokan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan sehari hari; 3) Biaya Transportasi , biaya transportasi tinggi, maka harga produk cenderung lebih tinggi di lokasi yang lebih jauh dari sumber produksi.

Analysis of Poverty Line Disparity in Bone Bolango Regency (Case Study of Kabila Subdistrict and Bone Pantai Subdistrict)

ABSTRACT

Differences in economic conditions are one of the causes of income disparity in the community that triggers poverty in several regions. This study aims to determine whether there is an effect of differences in food and non-food commodity prices between Kabila District and Bone beach District. The research used a qualitative approach with descriptive methods. The sample in this study were 30 people. Data

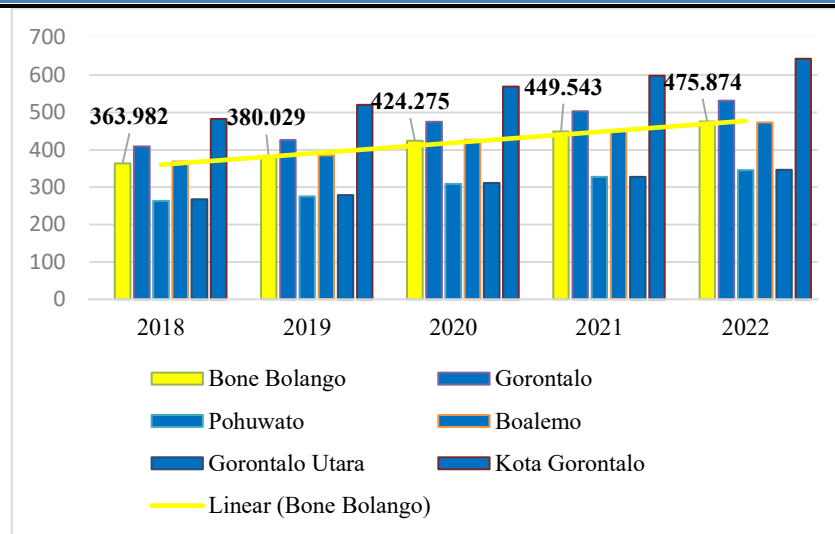
collection using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results showed that the disparity in the poverty line in Kabila and Bone Pantai sub-districts was caused by price differences between food and non-food commodities which were influenced by several factors 1) Infrastructure, the infrastructure in Kabila sub-district is fairly adequate with fairly high operational costs compared to Bone Pantai sub-district with inadequate market conditions which utilise more roads around the market; 2) Distance, the distance between traders that occurs between regions through the place of production of finished goods in the kabila sub-district is more strategic than the Bone Pantai sub-district, but it is different in terms of natural resource supply where the Bone Pantai sub-district is more strategic in producing supplies of natural resources that are daily needs; 3) Transport Costs, high transport costs, then product prices tend to be higher in locations further from the source of production.

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu diantara *developing country* yang tidak lepas dari persoalan kemiskinan, bahkan telah menjadi persoalan penting di setiap kepemimpinan nasional dan ditingkat regional. Kemiskinan merupakan suatu kondisi masalah dimana individu atau sekelompok orang yang tidak memenuhi hak hidup secara layak (Kurniawan, 2011). Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensial yang mencakup dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada dasarnya kemiskinan adalah ketidakmampuan mencukupi standar ekonomi di dalam masyarakat yang di ukur melalui pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi tugas berat yang harus diselesaikan di setiap rentan waktu periode sejarah pemerintah. Kemiskinan absolut merupakan indikator untuk melihat tingkat keparahan kemiskinan, khususnya yang ada di negara berkembang (Chen & Ravallion, 2007; Gweshengwe & Hassan, 2020). Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan menggambarkan pengeluaran minimum untuk makanan ataupun non makanan dari nilai rupiah. Konsumsi pada masyarakat dapat diklasifikasikan dalam bentuk konsumsi makanan dan selain makanan (S. Dai et al., 2023). Pengeluaran untuk makanan mencakup belanjaan masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk berbagai jenis makanan seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, daging, buah-buahan, produk makanan atau minuman siap saji, tembakau, dan sirih. Pada sisi lain, pengeluaran bukan makanan mencakup pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan di luar pangan. Penyediaan biaya bukan makanan mencakup biaya perumahan, bahan bakar, barang dan jasa, ongkos pendidikan, kesehatan, pakaian, alas kaki, barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta untuk perayaan dan upacara.

Berikut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Garis Kemiskinan (Ribu Rupiah) pada tahun 2018-2022.



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2018-2022.

Gambar 1. Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo 2018-2022

Berdasarkan gambar 1 di atas, garis kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2022 terlihat bahwa Garis kemiskinan tertinggi berada di kota Gorontalo sebesar 643,531 diikuti kabupaten Gorontalo dan kabupaten Bone bolango masing masing sebesar 531,294 dan 475,874, serta kabupaten Boalemo sebesar 472,906. Garis kemiskinan terendah berada di kabupaten Pohuwato dan kabupaten Gorontalo utara sebesar 345,924 dan 346,874

Penduduk yang termasuk dalam kategori miskin mempunyai hubungan kuat dengan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini bisa terjadi disebabkan kondisi wilayah dan beragamnya sumber penghasilan rumah tangga, seperti infrastruktur, fasilitas, dan akses yang berbeda. Tingginya angka garis kemiskinan karena terdapat ketimpangan yang besar antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga menghasilkan kesenjangan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat (Sahi et al., 2020). Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dapat dilihat dari pendapatan per kapita penduduk, sementara kualitas hidup tercermin dalam tingkat konsumsi yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, dengan target menjaga standar hidup yang layak. Menurut Puspita & Agustina, (2020) pendapatan perkapita ialah rata-rata pemasukan dari tiap orang ataupun buat tiap anggota keluarga yang didapatkan dengan menyamakan rata-rata pemasukan rumah tangga perbulan dengan jumlah anggota keluarga.

Semakin besar pemasukan yang diterima, maka daya beli penduduk juga akan meningkat. Dampak dari peningkatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, setiap individu dalam rumah tangga hendak memakai pendapatannya buat membeli bermacam benda serta jasa yang diucap dengan pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga. Selain itu, terkadang individu atau penduduk juga melakukan migrasi ke daerah lain, seperti perkotaan untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Wilayah ekonomi perkotaan dan pedesaan pembangunan ekonomi wilayah berkonsentrasi pada aspek-aspek yang pengaruhi perkembangan ekonomi wilayah (Dewi, 2019) yaitu sumber daya alam yang diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (*uniform/homogenous region*) yaitu wilayah yang memiliki karakteristik yang serupa atau seragam; (2) wilayah heterogen (*nodal region*) yaitu wilayah yang terdapat hubungan fungsional saling terkait yang disebabkan adanya perbedaan komponen; dan (3)

wilayah perencanaan (*planning region* atau *programming region*) yaitu wilayah yang tergabung dalam satu kesatuan kebijakan atau administrasi.

Kabupaten Bone bolango yang terdiri dari 18 kecamatan dalam hal ini kecamatan kabila yang merupakan kecamatan yang berdekatan dengan daerah perkotaan dan kecamatan Bone Pantai yang cukup berjauhan dari daerah perkotaan. Kecamatan kabila terdiri dari desa / kelurahan dutohe, dutohe barat, olohuta, olohuta utara, padengo, pauwo, poowo, poowo barat, talango, tanggilingo, toto selatan, tumbihe. Selanjutnya kecamatan Bone pantai terdiri dari desa Batu Hijau, bilungala, bilungala utara, kemiri, Lembah hijau, Ombulo Hijau, Pelita Hijau, Tamboo, Tihu, Tolotio, Tongo, Tunas Jaya dan Uabanga. Daerah ini merupakan wilayah yang memiliki karakteristik berbeda dari segi komponen harga yang dalam hal ini terlihat pada wilayah pedesaan dan juga sangat berpotensi dalam peningkatan produktivitas sumber daya alam seperti pertanian, peternakan serta perkebunan sehingga Pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan tingkat daerah yang dalam hal ini memerlukan indikator kemiskinan yang spesifik hingga tingkat area kecil, seperti kecamatan dan desa. Indikator kemiskinan area kecil biasanya diperoleh dengan penambahan sampel di luar survei utama Susenas. Hal yang sama juga digunakan untuk mendapatkan indikator kesejahteraan pada tingkat kecamatan/desa.

Tingginya angka garis kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango tentu saja diakibatkan oleh pendapatan dan pengeluaran masyarakat atau rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan yang membuat masyarakat tidak sejahterah. Hal ini juga disebabkan karena perbedaan harga antara masyarakat kecamatan kabila yang dalam hal ini dekat dengan perkotaan dan Kecamatan Bone pantai yang cukup jauh dari perkotaan. Beberapa riset sebelumnya telah mengidentifikasi kemiskinan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, diantaranya studi dari (Ferezagia, 2018; Illahi et al., 2019; Sugiyarto et al., 2016; Wijekoon et al., 2021) dan Canova & Pappa, (2007). Studi bertujuan mengidentifikasi dampak perbedaan harga komoditas makanan dan non makanan antara Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bone Pantai

METODE

Metode penelitian dalam riset ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dan dikumpulkan langsung dari masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Data yang di dapatkan melalui proses wawancara secara mendalam serta melakukan observasi dan dokumentasi secara langsung. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diteliti sebanyak 30 responden, yang terdiri dari 15 responden Kecamatan Kabila dan 15 responden Kecamatan Bone Pantai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Perbedaan Harga

Berdasarkan temuan di lapangan terdapat perbedaan komoditas makanan dan non makanan yang ada di kecamatan Kabila dan Bone Pantai, yaitu : *Pertama*, untuk jenis komoditas makanan yang dikelompokkan dalam cakupan komoditas kelompok Padi dan Umbi yaitu untuk komoditas tepung terigu dan ketela pohon yang menunjukkan proporsi harga di kecamatan Kabila lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan Bone pantai yang disebabkan oleh pola konsumsi yang tinggi dan faktor produksi yang terjadi di daerah tersebut; *Kedua*, untuk jenis komoditas makanan yang dikelompokkan dalam cakupan komoditas kelompok ikan sangat bervariasi seperti untuk Cakalang , Kembung dan Teri di

kecamatan Kabila menunjukkan proporsi harga yang relatif tinggi dan sebaliknya untuk Bandeng dan Mujair menunjukkan proporsi harga yang tinggi di Kecamatan Bone Pantai, Hal ini disebabkan oleh faktor Geografis ataupun lingkungan dari masing-masing Kecamatan tersebut.

Ketiga, untuk jenis komoditas makanan yang dikelompokkan dalam cakupan komoditas kelompok daging yaitu Daging sapi, Daging ayam ras, Daging ayam kampung, dan Tetelan, menunjukkan proporsi harga di Kecamatan Kabila lebih rendah dibandingkan dengan Proporsi harga yang ada di Kecamatan Bone Pantai yang terbilang relatif tinggi, hal ini disebabkan oleh pasokan daging yang tidak tersedia ataupun terbatas dalam hal pasokan pada komoditas tersebut; *Keempat*, untuk untuk jenis komoditas makanan yang dikelompokkan dalam cakupan komoditas kelompok telur dan susu yaitu susu kental manis dan susu bubuk terbilang sedikit mengalami perbedaan harga antara kecamatan kabila dan kecamatan Bone pantai yang disebabkan oleh biaya transportasi untuk persediaan komoditas tersebut.

Kelima untuk jenis komoditas makanan yang dikelompokkan dalam cakupan komoditas kelompok sayur dan rempah yaitu tomat sayur,angka muda, bawang merah, cabe merah dan cabe rawit menunjukkan proporsi harga di Kecamatan Bone pantai relatif rendah dibandingkan dengan Kecamatan Kabila, hal ini disebabkan oleh faktor ketersediaan sumber daya alam seperti lahan untuk pertanian dan ketersediaan mayoritas tenaga kerja yang menopang untuk sektor pertanian sehingga meningkatkan produksi lokal yang ada di kecamatan Bone pantai .

Kemudian untuk jenis komoditas non makanan seperti jasa dokter praktek menunjukkan proporsi harga di kecamatan Kabila relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan Bone pantai yang disebabkan biaya operasional praktek seperti biaya sewa tempat dan gaji staff yang ada di kecamatan kabila lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan kabila. Kemudian untuk pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak menunjukkan proporsi harga di kecamatan Kabila relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan Bone pantai yang disebabkan oleh kualitas yang tinggi serta permintaan akan pakaian yang terjadi di kecamatan kabila.

Kesimpulan dari Reduksi data

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga:

Pertama, kondisi infrastruktur di Kecamatan Kabila tergolong memadai, namun biaya operasionalnya tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Bone Pantai yang memiliki kondisi pasar yang kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur berperan penting dalam menentukan harga; *Kedua*, pengaruh jarak dan akses pada Kecamatan Kabila tergolong strategis karena dekat dengan pusat produksi barang jadi. Namun, beda halnya dengan pasokan sumber daya alam dimana Kecamatan Bone Pantai lebih strategis dalam pasokan sumber daya alam seperti rempah dan ikan; *Ketiga*, biaya transportasi menjadi faktor penting, terutama di Kecamatan Bone Pantai yang memiliki biaya transportasi menuju pusat perkotaan yang tinggi. Selain itu, penggunaan transportasi tradisional yang belum berbasis modern juga memengaruhi biaya transportasi. Di sisi lain, Kecamatan Kabila yang berdekatan dengan kota, menikmati biaya transportasi yang lebih murah dan telah memiliki akses ke transportasi modern seperti Grab atau Maxim

Perbandingan Harga Barang Utama:

Harga bahan pangan utama seperti beras, jagung, ketela rambat, telur, dan sayur-sayuran relatif seimbang antara kedua kecamatan karena distribusi yang efisien sedangkan

bahan pangan lainnya seperti harga cabai rawit, tomat, bawang, dan beberapa jenis ikan berbeda antara kecamatan karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan geografis.

Respons Konsumen terhadap Perbedaan Harga:

1. Kesadaran Harga: Konsumen cenderung memilih belanja dengan harga terjangkau, meskipun dengan fleksibilitas tertentu tergantung pada kemampuan finansial.
2. Kualitas Produk: Konsumen bersedia membayar lebih untuk produk berkualitas tinggi, terutama untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Ketersediaan Alternatif: Akses ke alternatif belanja seperti pasar tradisional dan minimarket memudahkan konsumen untuk membandingkan harga dan memilih opsi terbaik

Implikasi Kebijakan

1. Peningkatan Infrastruktur yang ada di kecamatan Bone pantai khususnya pengembangan pusat perdagangan yang lebih efisien.
2. Mendorong pengembangan pasar lokal dalam meningkatkan akses konsumen terhadap berbagai produk dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
3. Menerapkan sistem monitoring harga dan regulasi yang efektif untuk mencegah praktik harga yang tidak wajar.
4. Mendorong diversifikasi produksi antar kecamatan dengan mempertimbangkan jenis barang atau layanan yang dapat diproduksi dengan biaya operasional yang lebih efisien.
5. Mendukung pusat produksi lokal dengan memberikan insentif atau bantuan kepada usaha mikro dan kecil di wilayah tersebut.

Pembahasan

Perbedaan harga adalah suatu variasi pada nilai harga antara dua atau lebih produk, barang, atau aset dalam suatu pasar pada waktu tertentu. Perbedaan harga juga merupakan faktor kompleks yang melibatkan dinamika ekonomi, strategi pemasaran, serta karakteristik produk atau layanan itu sendiri, biasanya hal ini mencerminkan ketidakseragaman nilai ekonomi yang ditemui dalam pembelian dan penjualan berbagai produk atau layanan serta menciptakan dinamika pasar yang kompleks.

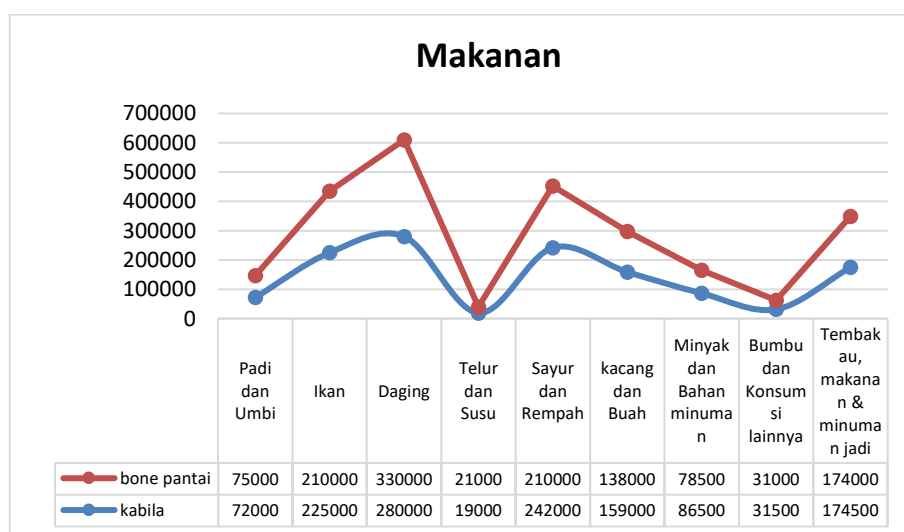
Hasil penelitian analisis reduksi menunjukkan perbedaan harga sangat dipengaruhi dengan sejumlah faktor, diantaranya adalah kondisi infrastruktur, jarak dan biaya transportasi. Infrastruktur memainkan peran penting dalam menentukan perbedaan harga karena dapat memengaruhi efisiensi produksi dan distribusi. Merujuk pada publikasi Aini (2018) infrastruktur memberikan sumbangsih penting dalam memajukan pembangunan ekonomi di mana kondisi ekonomi yang lebih baik ditemukan pada wilayah dengan tingkat kesiapan infrastruktur yang memadai. Hal ini relevan dengan hasil temuan dilapangan bahwa infrastruktur yang baik, seperti jalan raya dan sistem transportasi yang efisien, dapat mengurangi biaya logistik dan memperlancar aliran barang dari produsen ke konsumen. Sebaliknya, infrastruktur yang buruk atau kurang berkembang dapat menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan dalam rantai pasok, seperti yang terjadi pada kecamatan kabila terbilang memadai dengan biaya operasional yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan kabila dengan kondisi pasar yang tidak memadai yang lebih memanfaatkan ruas jalan di sekitar pasar tersebut, yang kemudian dapat menciptakan perbedaan harga antar wilayah.

Jarak adalah bilangan yang menginformasikan seberapa jauh suatu entitas berubah kedudukan melalui suatu jalur tertentu. Jarak diantara pedagang dapat memicu persaingan sesama pedagang, sehingga kesempatan perolehan pendapatan pedagang memungkinkan untuk terpengaruh (Carra et al., 2016). Jarak pedagang yang terjadi antar wilayah melalui tempat produksi barang jadi yang ada di kecamatan kabila lebih strategis dibandingkan dengan kecamatan bone pantai, tetapi beda halnya dari segi pasokan sumber daya alam dimana kecamatan bone pantai yang lebih strategis dalam penghasil pasokan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Biaya transportasi pada suatu aktivitas produksi sebagai suatu pelaksanaan usaha niaga yang melingkupi pengangkutan komoditas dari tempat olahan atau pabrikasi sampai ke lokasi penjualan (Widodo, 2018).

Biaya Transportasi juga mempengaruhi harga suatu produk cenderung lebih tinggi di daerah karena biaya transportasi lebih yang tinggi, hal ini relevan dengan temuan di lapangan bahwa dengan biaya transportasi yang tinggi dapat menyebabkan produk menjadi lebih mahal sehingganya menciptakan perbedaan harga antara wilayah. Kemudian Biaya transportasi sendiri merupakan elemen kunci dalam menentukan perbedaan harga, jika biaya transportasi tinggi, maka harga produk cenderung lebih tinggi di lokasi yang lebih jauh dari sumber produksi. Selain itu transportasi yang tersedia di kecamatan kabila sudah menggunakan transportasi modern yang mempermudah dalam transparansi biaya dibandingkan dengan kecamatan bone pantai yang masih menggunakan transportasi tradisional.

Temuan ini mendukung beberapa studi sebelumnya dari Hayakawa & Tsubota (2022), Lin (2017), Mayer & Trevien (2017), Donaldson (2018), Donaldson & Hornbeck (2016), Faber (2014), Ahlfeldt & Feddersen (2018) dan Baum-Snow *et al.*, (2017) yang menyoroti dampak infrastruktur terhadap variabel ekonomi, termasuk komoditas harga. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung dapat meningkatkan waktu dan biaya transportasi jalan raya dapat mengakibatkan konsentrasi lokasi produksi di satu wilayah dan distribusi barang dari wilayah tersebut ke semua wilayah.

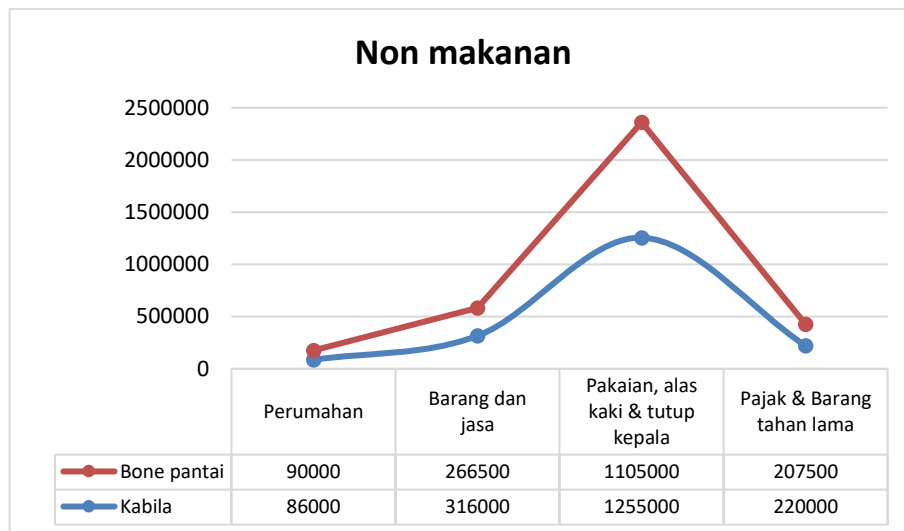
Kemudian dalam analisis Penyajian data komoditas makanan dan non makanan yang di kelompokkan dan total harga pengeluaran yang di dapatkan dari temuan lapangan berikut.



Sumber : Data Primer 2023

Gambar 2. Total Harga Komoditas Makanan

Berdasarkan gambar 2 Total harga komoditas makanan yang dikelompokkan dalam kelompok ikan, sayur dan rempah, kacang dan buah, minyak dan bahan minuman, bumbu dan konsumsi lainnya, tembakau, makanan dan minuman jadi, menunjukkan total harga di kecamatan kabila lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan bone pantai. Sebaliknya terdapat beberapa kelompok komoditas seperti padi dan umbi, daging, telur dan susu, menunjukkan total harga di kecamatan Bone pantai lebih tinggi dibandingkan kecamatan kabila



Sumber : Data Primer 2023

Gambar 3. Total harga Komoditas Non Makanan

Berdasarkan gambar 3 total harga komoditas non makanan yang dikelompokkan untuk kelompok barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, pajak dan barang tahan lama menunjukkan total harga di Kecamatan Kabila lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan bone pantai. Sebaliknya untuk kelompok komoditas perumahan menunjukkan total harga di Kecamatan Bone pantai lebih tinggi dibandingkan kecamatan kabila. Kecamatan Kabila yang dalam hal ini sebagai kecamatan yang memiliki posisi strategis berdekatan langsung dengan pusat perkotaan, sehingganya total harga seluruh komoditas makanan dan non makanan yang ada di Kecamatan Kabila adalah sebesar Rp. 1.289.500 dan 1.877.000. Sementara itu, Kecamatan Bone pantai merupakan kecamatan yang cukup berjauhan dari pusat perkotaan dengan total harga seluruh komoditas makanan dan non makanan yaitu komoditas makanan yang ada di Kecamatan Kabila menunjukkan total harga Rp. 1.267.500 dan Rp. 1.669.000.

Menurut Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Artinya jika harga makanan dan non makanan tinggi maka yang harus dibayarkan oleh seseorang akan menjadi tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingginya harga dapat berdampak pada peningkatan angka garis kemiskinan. Jika dilihat berdasarkan total harga komoditas makanan dan non makanan dari kedua kecamatan tersebut maka tingkat garis kemiskinan di Kecamatan Bone pantai lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Kabila.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa disparitas garis kemiskinan antara Kecamatan Kabila dan Bone pantai terdapat perbedaan harga antara komoditas makanan dan non makanan yang dipegaruhi oleh beberapa faktor yaitu (1) *Infrastruktur*: Infrastruktur pada kecamatan kabila terbilang memadai dengan biaya operasional yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan Bone pantai dengan kondisi pasar yang tidak memadai yang lebih memanfaatkan ruas jalan di sekitar pasar tersebut. (2) *Jarak*: jarak pedagang yang terjadi antar wilayah melalui tempat produksi barang jadi yang ada di kecamatan kabila lebih strategis dibandingkan dengan kecamatan bone pantai, tetapi beda halnya dari segi pasokan sumber daya alam dimana kecamatan bone pantai yang lebih strategis dalam penghasil pasokan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan sehari hari. (3) *Biaya Transportasi*: biaya transportasi tinggi, maka harga produk cenderung lebih tinggi di lokasi yang lebih jauh dari sumber produksi.

Selain itu, pada perbedaan harga yang terjadi di kecamatan kabila dan Bone pantai disebabkan oleh pola konsumsi yang tinggi dan faktor produksi, ketersediaan sumber daya alam seperti kondisi Geografis atau lingkungan dari masing masing wilayah tersebut. Perbedaan harga makanan dan non makanan yang mencerminkan proporsi harga yang tinggi dapat berdampak pada peningkatan angka garis kemiskinan. Dalam konteks ini kecamatan kabila menunjukkan proporsi harga yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan Bone pantai maka tingkat garis kemiskinan di Kecamatan Bone pantai lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Kabila.

REFERENSI

- Ahlfeldt, G. M., & Feddersen, A. (2018). From periphery to core: Measuring agglomeration effects using high-speed rail. *Journal of Economic Geography*, 18(2), 355–390. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbx005>
- Aini, A. (2018). *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap pembangunan Ekonomi*.
- Canova, F., & Pappa, E. (2007). Price Differentials in Monetary Unions: The Role of Fiscal Shocks. *The Economic Journal*, 117(520), 713–737. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02047.x>
- Carra, G., Mulalic, I., Fosgerau, M., & Barthelemy, M. (2016). Modelling the relation between income and commuting distance. *Journal of The Royal Society Interface*, 13(119), 20160306. <https://doi.org/10.1098/rsif.2016.0306>
- Chen, S., & Ravallion, M. (2007). Absolute poverty measures for the developing world, 1981–2004. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(43), 16757–16762. <https://doi.org/10.1073/pnas.0702930104>
- Dewi, K. (2019). *Konsep Wilayah Homogen, Nodal, Perencanaan dan Administrasi*. 1977, 2–4.
- Donaldson, D., & Hornbeck, R. (2016). Railroads and American economic growth: A “market access” approach. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(2), 799–858.
- Faber, B. (2014). Trade integration, market size, and industrialization: Evidence from China’s national trunk highway system. *Review of Economic Studies*, 81(3), 1046–1070. <https://doi.org/10.1093/restud/rdu010>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Gweshengwe, B., & Hassan, N. H. (2020). Defining the characteristics of poverty and their implications for poverty analysis. *Cogent Social Sciences*, 6(1), 1768669.

<https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1768669>

- Illahi, N., Adry, M. R., & Triani, M. (2019). Analisis Determinan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 549. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5025>
- Kurniawan, D. (2011). Kemiskinan di Indonesia dan Penanggulangannya. *Gema Eksos*, 5(1), 1–18.
- Lin, Y. (2017). Travel costs and urban specialization patterns: Evidence from China's high speed railway system. *Journal of Urban Economics*, 98, 98–123. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2016.11.002>
- Mayer, T., & Trevien, C. (2017). The impact of urban public transportation evidence from the Paris region. *Journal of Urban Economics*, 102, 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2017.07.003>
- Puspita, C. D., & Agustina, N. (2020). Pola Konsumsi, Elastisitas Pendapatan, Serta Variabel-Variabel Sosial Ekonomi Yang Memengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 700–709. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.46>
- S. Dai, S. I., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). Analisis Pengaruh RLS, Pengeluaran Perkapita, UHH, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di KBI Dan KTI. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 535–544. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.950>
- Sahi, D. F., Arham, M. A., & Santoso, I. R. (2020). The Impact of Government Infrastructure Spending on Economic Growth and Poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i1.4494>
- Sugiyarto, S., Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2016). Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro. *Agro Ekonomi*, 26(2), 115. <https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17264>
- Widodo. (2018). Pengaruh Biaya Transportasi Dan Biaya Promosi Terhadap Hasil Penjualan Pada PT Batik Keris Surakarta 2018. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 0–7.
- Wijekoon, R., Sabri, M. F., & Paim, L. (2021). Poverty: A Literature Review of the Concept, Measurements, Causes and the Way Forward. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(15), 93–111. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i15/10637>